

## **MENAMBANG KALI BRANTAS: DARI KRISIS MENUJU JALAN KELUAR**

**Nawiyanto, IG Krisnadi, Eko Crys Endrayadi, Sri Ana Handayani,  
Dewi Salindri, Nina Mutiara Calvaryni**

Kelompok Riset Sejarah Lingkungan  
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember  
Jl. Kalimantan N0. 37, Sumbersari, Jember, Jawa Timur 68121

### ***Abstrak***

Artikel ini membahas penambangan pasir di Sungai Brantas yang semula bermanfaat berubah menjadi ancaman dan diharapkan dapat lebih memperkaya historiografi sungai yang sejauh ini lebih banyak menyoroti sungai sebagai pusat peradaban, sumber bencana, dan pencemaran. Dengan bersandar pada sumber arsip, surat kabar sejaman, dan wawancara, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi seiring akselerasi panambangan pasir, yang dipicu tumbuhnya permintaan galian pasir untuk pembangunan kota dan difasilitasi oleh penggunaan teknologi modern berupa mesin penyedot pasir mekanis. Penambangan pasir mekanis menimbulkan kerusakan infrastruktur dan pemukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari wilayah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keragaman hayati. Upaya mencari solusi telah berlangsung lama, namun gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan terjadi bukan karena ketiadaan payung hukum, melainkan sulitnya implementasi regulasi di lapangan akibat keterlibatan oknum aparat dan politisi dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar secara mudah dan cepat dari menambang di tengah keterbatasan alternatif pekerjaan yang tersedia.

Kata kunci: penambangan pasir, krisis lingkungan, Sungai Brantas, pencarian solusi

### ***MINING BRANTAS RIVER: FROM CRISIS TO WAY OUT***

### ***Abstract***

*This article discusses the sand mining in the Brantas River which was initially useful but has turned to be a threat, and is expected to further enrich the historiography of the river, which has so far focused more on the river as a center of civilization, source of disaster and pollution. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand mining, which was triggered by growing demand for sand for city development and facilitated by the use of modern technology in the form of mechanical sand extracting machines. Mechanical sand mining causes damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time, but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal umbrella, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and easy profits from mining in the midst of the limited available alternative employment.*

*Keywords: sand mining, environmental crisis, Brantas River, finding solutions*

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan sungai telah menarik minat sejarawan untuk menuangkannya dalam karya historiografis. Historiografi sungai secara garis besar banyak menyoroti peran sungai sebagai pusat peradaban dan sumber bencana. Pentingnya sungai sebagai pusat peradaban disuarakan misalnya dalam karya bunga rampai Gunawan (2008) tentang Sungai Brantas di Jawa Timur dan karya Asnan (2016) tentang sungai-sungai di Sumatera. Tidak hanya di Indonesia saja, banyak peradaban dunia pada masa lalu berkembang di daerah aliran sungai, misalnya Sungai Nil di Mesir, Efrat dan Tigris di Irak, Indus dan Gangga di India (Lapian, 2008:1). Pembahasan historis sungai dalam kaitan dengan bencana banjir muncul dalam tulisan Gunawan (2010) tentang problem banjir di Jakarta dan Sarkawi (2016) tentang banjir di Surabaya. Selain kedua karya penting ini, historiografi sungai yang membahas banjir juga dihasilkan Raziqa mengenai banjir di Panarukan, Suhud tentang banjir di Lamongan, Priyanto tentang banjir di Semarang, dan Ismiyah mengenai banjir di Jember (Nawiyanto, 2016:21).

Historiografi sungai belakangan ini semakin diperkaya dengan munculnya kajian-kajian yang mengangkat tema pencemaran sungai di Jawa Timur (Lucas dan Djati, 2000; Ridhoi, 2017; Nawiyanto, 2018; Komalasari, 2018). Isu pencemaran berkembang cepat seiring semakin kronisnya problem pencemaran akibat pertumbuhan populasi dan kegiatan industri yang menyebabkan kualitas lingkungan sungai mengalami degradasi. Pada tahun 2008 sejumlah sungai seperti Krueng (Aceh), Kampar (Riau), Musi (Sumatera), Ciliwung (Jakarta), Citarum (Jawa Barat), Bengawan Solo (Jawa Tengah dan Timur), Tukad Badung (Bali), Kahayan dan Martapura (Kalimantan) dilaporkan sudah tercemar parah (Keraf, 2010:44). Sungai Citarum sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat bahkan mendapat julukan sungai paling tercemar di dunia ([idntimes.com](http://idntimes.com), 09 March 2018). Di tengah tumbuhnya minat akademis dan problem nyata pencemaran, aspek yang belum banyak disoroti dalam historiografi sungai adalah dinamika ekstraksi bahan galian sungai dan dampaknya. Padahal kegiatan ini sudah berlangsung lama, melibatkan banyak orang, dan menimbulkan ancaman nyata.

Dengan pertimbangan aktual dan historiografis tersebut, tulisan ini bermaksud mengisi kekosongan yang ada dengan mengangkat penambangan pasir Sungai Brantas. Topik ini menarik dikaji di tengah maraknya penambangan pasir yang tampak kontras dengan langkah penertiban yang dilakukan aparat pemerintah. Data tahun 2004, misalnya, menunjukkan sebanyak 6.280 pekerja terlibat dalam penambangan pasir Sungai Brantas dengan volume penambangan sebesar lebih dari 2,7 juta ton per tahun (Soekistijono, 2008:204). Permasalahan yang hendak dikaji dalam tulisan ini yakni: Bagaimana penambangan pasir telah menyebabkan terjadinya krisis Sungai Brantas? Dampak apakah yang ditimbulkan oleh penambangan pasir? Bagaimana krisis Sungai Brantas akibat penambangan pasir dicarikan jalan keluarnya?.

Pilihan Sungai Brantas sebagai fokus pembahasan didasari pertimbangan maraknya penambangan pasir di sungai ini dan status Sungai Brantas sebagai sungai utama di Jawa Timur. Sungai Brantas mengawali aliran dengan mata air di Desa Sumber Brantas (Kota

Batu) di lereng Gunung Arjuna. Dalam perjalanan menuju hilir di Selat Madura, sungai ini digabung dengan sungai-sungai kecil lain di wilayah yang dilintasinya dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, hingga Mojokerto. Dari sini Sungai Brantas bercabang dua menjadi Kali Mas yang mengalir ke arah Surabaya dan Kali Porong yang melintasi Sidoarjo. Kali Brantas memiliki daerah aliran sungai (DAS) seluas 11.800 km<sup>2</sup> atau 1/4 dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Panjang sungai Brantas mencapai 320 km yang mengalir melingkari Gunung Kelud. (Parwanto, 2008:175-176).

Tulisan ini menggunakan metode sejarah. Metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan kerja, yakni 1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber penulisan yang relevan dengan subyek garap), 2) kritik sumber (perlakuan kritis atas sumber-sumber yang terkumpul untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas informasi untuk menjadi fakta-fakta sejarah), 3) interpretasi (menelaah fakta-fakta sejarah untuk menyusun argumentasi historis), dan 4) historiografi (menuangkan argumentasi sebagai sintesis sejarah dalam bentuk kisah) (Storey, 2011). Data yang dirujuk meliputi (baik) sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa bahan arsip dikumpulkan dari Koleksi Badan Perpustakaan dan Arsip Jawa Timur di Surabaya dan berita-berita surat kabar yang memuat berita tentang penambangan pasir Sungai Brantas. Untuk melengkapi pembahasan, tulisan juga menggunakan sumber sekunder berupa buku, artikel, maupun laporan-laporan hasil penelitian yang relevan dengan bahasan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Krisis Sungai Brantas: Dari Penambangan Manual ke Mekanik**

Penambangan pasir di Sungai Brantas sudah berlangsung lama. Kegiatan ini meningkat pesat pada jaman Belanda seiring dengan pembangunan infrastruktur seperti dam, jembatan, jalan, pabrik, kantor dan rumah tinggal untuk mendukung kepentingan perkebunan. Sebagai ilustrasi, pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1885 melakukan pembangunan irigasi Brantas seluas 96.000 *bau*, pada tahun 1902 menjadi 173.000 *bau* (Marwati, 1984:47). Pembangunan infrastruktur memerlukan pasir dalam volume besar dan Kali Brantas menjadi andalan. Penambangan dilakukan dengan mengerahkan tenaga kerja penduduk yang tinggal di sepanjang Sungai Brantas maupun tenaga kerja yang direkrut pemerintah kolonial Hindia-Belanda dari daerah lain melalui sistem kerja rodi (Purnama, 2011:17).

Penambangan pasir semakin meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur kota. Surabaya mencatat pembangunan kawasan pemukiman untuk orang Eropa yang pesat sejak awal abad ke-20 (Basundoro, 2013:76-80). Selain pemukiman, perkembangan Surabaya sebagai pusat kemajuan di ujung Timur Jawa ditopang oleh perkembangan sektor industri yang pesat dengan beragam bentuk (Dick, 2002:264-267). Pembangunan infrastruktur yang terus tumbuh tentu meningkatkan volume permintaan bahan galian sungai khususnya pasir. Bahkan permintaan pasir tidak hanya datang dari kalangan orang Eropa saja, melainkan sebagian juga berasal dari kalangan masyarakat pribumi yang mulai mengadopsi bangunan rumah yang lebih permanen. Dua sumber permintaan tersebut menjadi pendorong

perkembangan penambangan pasir komersial yang mulai marak terjadi terutama sejak awal abad ke-20 (Jasa Tirta , 2012:13).

Pada mulanya penambangan pasir dilakukan secara tradisional. Pasir sungai ditambang dengan cara menyelam ke dasar sungai dengan menggunakan *cikrak* atau *cungkro*. Dari dasar sungai pasir dikumpulkan terlebih dahulu di atas perahu hingga mencapai volume tertentu. Perahu yang telah terisi pasir, kemudian dibawa ke pinggir sungai untuk dipindahkan pasirnya ke tanah lapang dengan menggunakan *dunak* yang ditaruh di atas kepala. Masyarakat di Kediri menyebut pekerja tersebut sebagai kuli *ndunak*. Penambangan pasir secara manual membutuhkan sekitar 17-20 orang setiap perahu (Wawancara Mondir, 28 Juni 2019).

Permintaan pasir Brantas untuk material bangunan terus tumbuh seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur. Pasir Brantas banyak diminati karena kualitasnya yang baik. Meningkatnya kebutuhan pasir membuat penambangan pasir secara manual tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Untuk memecahkan persoalan ini, penggunaan konveyor mulai diadopsi dalam kegiatan penambangan sejak pertengahan 1980-an. Penambangan masih dilakukan secara manual, namun dalam pemindahan pasir dari atas perahu menuju truk digunakan mesin konveyor, berupa karet berjalan yang terhubung pada dua atau lebih katrol berputar melaluinya pasir terangkut dari perahu menuju ke atas kemudian mengalir ke dalam bak truk (Mondir, 28 Juni 2019).

Penambangan pasir dengan mesin konveyor biasanya melibatkan tenaga 9-10 orang setiap perahu (Wawancara Supriono, 28 Juni 2019). Berdasarkan pekerjaan yang dilakukan mereka dibagi menjadi dua, yakni *kuli bojong* dan *kuli cutat*. Masyarakat setempat menyebut penambang pasir yang menyelam di dasar sungai untuk mendapatkan pasir sebagai kuli *bojong*. Kuli *cutat* merupakan istilah setempat untuk menyebut pekerja penambang pasir yang memindahkan pasir dari perahu ke alat bantu konveyor. Penggunaan konveyor memang meningkatkan volume pasir yang dihasilkan, namun permintaan pasir juga tumbuh jauh lebih cepat lagi. Permintaan ini datang dari para kontraktor di berbagai wilayah di Jawa Timur seperti Surabaya, Gresik, Tulungagung, Trenggalek, Blitar (Mondir, 28 Juni 2019).

Sejak pertengahan 1980-an praktek penambangan pasir Sungai Brantas mulai mengalami perubahan dengan berkembangnya penambangan secara mekanis. Penambangan pasir model baru ini ditandai dengan penggunaan mesin diesel yang berfungsi sebagai alat menyedot pasir (Arsip Bakesbangpol No.3080). Mesin ini bekerja menyedot pasir melalui pipa yang langsung menjulur ke tepi atau tengah sungai dengan atau tanpa harus menggunakan perahu (Wawancara Erfan Sodiq 27 Juni 2019). Tenaga mesin diesel yang kuat menyedot pasir bersama batu kerikil dari dasar sungai dan menyalurkannya secara langsung ke darat. Mesin penyedot dilengkapi pula dengan saringan yang memisahkan batu kerikil dari pasir dan pasirnya langsung masuk ke dalam bak truk (Wawancara Supriono 27 Juni 2019).

Dengan penggunaan mesin penyedot, volume pasir yang dikeruk lebih besar dibanding penambangan manual. Satu mesin penyedot pasir dengan 5 orang tenaga kerja, misalnya, dalam satu hari mampu mengumpulkan pasir sebanyak 20 bak truk. Penambangan pasir secara manual dengan melibatkan 5 tenaga penambang hanya mampu mengumpulkan pasir

maksimal sebanyak 2 bak truk per hari (Mondir 28 Juni 2019). Data tahun 2004 menunjukkan volume pasir yang ditambang dari Sungai Brantas di Kabupaten Kediri dan Kota Kediri sebanyak 567.200 ton, dengan rincian sebanyak 318.500 ton berasal dari penambangan mekanis. Sisanya sebanyak 248.700 ton berasal dari kegiatan penambangan secara manual (Soekistijono, 2008:204).

Dorongan utama maraknya penambangan pasir mekanik adalah peningkatan permintaan pasir untuk pembangunan di Surabaya. Semula penambangan pasir mekanis banyak berkembang di Sidoarjo dan Mojokerto. Dengan semakin menipis cadangan pasir, penambangan bergeser ke arah Jombang dan terus ke wilayah Sungai Brantas di Kediri yang potensi pasirnya dianggap masih besar (Radar Kediri, 2 Desember 2010). Di Kediri praktek penambangan pasir mekanis muncul di beberapa lokasi seperti di Kecamatan Kras, Gampengrejo, Parpar, Mojo, Ngadiluwih, Purwoasri dan di Kecamatan Kota. Penambangan pasir secara mekanik terus bertambah jumlahnya sepanjang tahun. Semakin banyak orang khususnya yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Brantas di Jombang dan Mojokerto berkeinginan meraup rupiah secara mudah dan cepat dengan melakukan penambangan mekanis. Bahkan, di antara orang-orang ini terdapat oknum aparat pemerintah yang tergoda ikut terjun dalam bisnis eksploitasi pasir Brantas. Masifnya ekstraksi pasir membuat cadangan pasir Sungai Brantas terus berkurang karena kecepatan terbentuknya cadangan pasir oleh aliran air yang mengangkutnya dari wilayah hulu jauh terlampaui. Akibatnya dasar sungai Brantas menjadi semakin dalam dan dampak yang ditimbulkannya dengan cepat hadir di depan mata mengancam lingkungan dan ekonomi kawasan DAS Brantas. (Bagian berikut akan membahas masalah ini).

## **B. Dampak Penambangan**

Akselerasi penambangan pasir Sungai Brantas berpengaruh terhadap status kegiatan dan dampak yang ditimbulkannya secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Sebagai bentuk pengambilan bahan mineral dari alam dan dampak kegiatan penambangan tergantung pada teknologi ekstraksi yang digunakan dan potensi bahan tambang yang tersedia. Perspektif historis atas penambangan pasir Sungai Brantas memperlihatkan bahwa perubahan dalam menambang sumber daya telah mengubahnya dari berkah menjadi bencana. Pengejaran keuntungan sebesar-besarnya melalui akselerasi eksploitasi yang difasilitasi adopsi teknologi penyedot pasir telah mendatangkan kerugian ekonomi dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan sungai Brantas.

Penambangan pasir Brantas secara tradisional yang telah berlangsung lama dipandang bermanfaat secara ekonomi dan lingkungan. Penambangan pasir Sungai Brantas telah menyediakan sumber penghasilan bagi penambang dan bahan material penting untuk pembangunan infrastruktur. Penambangan juga mengurangi resiko banjir akibat pendangkalan sungai akibat menumpuknya sedimen material vulkanik dari Gunung Kelud. Pendangkalan dasar sungai mengurangi kapasitas dalam menampung volume air yang melimpah pada musim penghujan sehingga meningkatkan ancaman banjir. Penambangan pasir mencegah

pendangkalan dan mempertahankan kedalamannya sehingga sungai dapat menampung volume air lebih besar. Penambangan pasir hingga tingkat tertentu telah lama berfungsi dalam kerangka mitigasi bencana karena meningkatkan daya tampung sungai sehingga mengurangi resiko meluapnya aliran Sungai Brantas (Faturrohman, 2012:15).

Manfaat penambangan pasir tersebut menghilang dengan merebaknya penambangan pasir mekanik. Penambangan pasir mekanis telah menurunkan dasar Sungai Brantas. Dalam surat Sekretaris Wilayah/Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Soemarjono Hadikoesoemo kepada Kepala Ditsospol Jawa Timur tanggal 9 Desember 1987 disebutkan bahwa dasar Sungai Brantas telah turun antara 1-2 meter dan menyebabkan terganggunya fungsi bangunan pengambil air (intake) irigasi pada musim kemarau (Arsip Bakesbangpol No.3080). Perum Jasa Tirta Kediri sebagai pengelola Kali Brantas di wilayah Kediri mencatat penurunan dasar Kali Brantas dari tahun 2004 hingga 2009. Pada tahun 2004 dasar Kali Brantas telah turun antara 3–4 meter dan pada tahun 2006 penurunan telah mencapai 8 meter (Mahmudi, 2012:12). Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, Didik Eko Cahyono, pada tahun 2010 menyebutkan kedalaman Sungai Brantas yang semula 20 meter bertambah dengan kisaran antara 6-12 meter (Radar Kediri, 22 Juli 2010). Bertambahnya kedalaman dasar Sungai Brantas berdampak buruk terhadap bangunan irigasi, pengendali banjir, jembatan, bangunan pemukiman dan pekarangan yang berlokasi di atas dan di sepanjang wilayah aliran Sungai Brantas.

Keprihatinan terhadap dampak buruk penambangan pasir yang merusak jembatan dan alur sungai sudah mulai disuarakan sejak 1984. Pemimpin Umum Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas, Ir. Roedjito DM Dipl. HE, dalam suratnya kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Juli 1984 melaporkan kerusakan Jembatan Porong dan Jembatan Permisan yang membahayakan keselamatan lalu lintas (Arsip Bakesbangpol No.3080). Ancaman kerusakan tidak hanya terjadi di wilayah Sidoarjo saja, melainkan dijumpai pula di daerah lain. Dalam Nota Dinas Wagub Jawa Timur Soeparmanto kepada Gubernur Jawa Timur tanggal 10 November 1986, disebutkan pengambilan pasir secara mekanik yang merusak di hulu Jembatan Porong Sidoarjo dilakukan Yayasan Bumi Tarik, sedangkan di Desa Kedung Bocok diusahakan oleh Kepala Desa Sebani bernama Simin dan anaknya yang menjabat kepala Desa Mliriprowo bernama Suharto Sumoredjo. Kerusakan dilaporkan juga terjadi pada tanggul beton Sungai Brantas di sekitar Jembatan Tol Mojokerto (Arsip Bakesbangpol No.3080).

Bertambahnya kedalaman Sungai Brantas juga merusak bangunan irigasi dan fasilitas umum lainnya. Bendungan Waruturi di Kecamatan Gampengrejo dilaporkan menggantung dan menurunkan kapasitas fungsinya yang sangat vital untuk mengatur irigasi wilayah Kediri, Jombang dan Nganjuk (Fathurohman, 2012:16). Di Mojokerto, penambangan pasir menyebabkan tidak berfungsinya Sipon Watukadon di Kecamatan Gedek dan Intake Gotan di Kecamatan Kudu yang mengganggu irigasi persawahan (Arsip Bakesbangpol No.3080). Sedikitnya 67 fasilitas umum dilaporkan dalam kondisi rusak, beberapa di antaranya rusak parah (Jasa Tirta, 2012:34). Jembatan Mrican warisan Belanda yang vital menghubungkan

wilayah sebelah barat dan timur Sungai Brantas dilaporkan ambles. Kaki-kaki besi penopangnya menggantung karena sedimen yang mendasarinya hilang. Pada 28 April 2010 Jembatan Mrican bahkan kemudian ditutup dan menunggu perbaikan karena kondisinya membahayakan keselamatan pengguna. Jembatan dilaporkan retak sepanjang 15 meter dan melengkung bagian tengahnya setelah tiang pancangnya roboh ditabrak perahu penambang pasir (Radar Kediri, 29 April 2010; Surya, 7 Mei 2010). Kerusakan juga menimpa Jembatan Semampir yang baru dibangun 1995. Fondasinya ambles karena sedimen tumpuannya tergerus (Surya, 12 April 2010). Kerusakan juga dilaporkan terjadi pada Jembatan Brawijaya yang menghubungkan Kota Kediri bagian barat dan timur yang dibelah Sungai Brantas (Surya, 12 Mei 2010). Rumah dan pekarangan penduduk juga rusak seperti terjadi di Desa Mlati, Desa Tambengbendo, Desa Sukoanyar Kecamatan Mojo, dan di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngadiluwih (Wawancara Hari Setiono 29 Juni 2019).

Biaya untuk merehabilitasi rusaknya infrastruktur akibat penambangan pasir mekanik tidak kecil. Perbaikan darurat atas kerusakan di Kediri disebutkan telah menghabiskan biaya hingga 800 miliar. Rehabilitasi kerusakan secara menyeluruh dikatakan dapat memakan dana hingga triliunan, beban dana yang tidak mungkin dapat ditanggung pemerintah (Radar Kediri, 22 Juli 2010). Sebagian kerusakan khususnya menyangkut hilangnya keragaman hayati ekosistem Sungai Brantas bahkan dikhawatirkan tidak dapat pulih kembali. Pengamatan yang dilakukan Ecoton menemukan bahwa dalam waktu enam bulan biodiversitas ikan Sungai Brantas berkurang dari 41 jenis menjadi 35 jenis. Jenis ikan yang hilang adalah golongan bader karena tempat berbiaknya lenyap karena pengerukan pasir (Radar Kediri, 16 Juli 2010). Penambangan pasir Brantas dengan demikian menjadi bagian dari apa yang disebut Jared Diamond (2014) sebagai “ekosida”, proses penghancuran lingkungan yang menopang masyarakat. Seperti ditunjukkan Diamond melalui kajiannya atas nasib berbagai peradaban dunia, kegagalan menyelesaikan permasalahan ekologis merupakan jalan menuju runtuhnya masyarakat.

### **C. Mencari Jalan Keluar**

Dampak negatif penambangan pasir mekanis memicu tanggapan dari kalangan pemerintah dan masyarakat. Dari kalangan pemerintah tanggapan muncul dari Badan Pelaksana Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Kali Brantas. Dalam surat kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 20 Juli 1984, Ir Roedjito meminta gubernur menghentikan dan menata kembali kegiatan penambangan sesuai dengan persyaratan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan (Arsip Bakesbangpol No.3080). Munculnya tanggapan dari otoritas yang menangani sungai mirip dengan masa kolonial yang memperlihatkan inisiatif para penanggungjawab kepentingan irigasi dalam mendorong konservasi hutan untuk kepentingan irigasi dan tata hidrologis. Meminjam istilah Hannigan (2006:65-66), mereka adalah “pembuat klaim” dalam konstruksi sosial problem lingkungan, yang mendesakkan pandangannya untuk langkah-langkah korektif melalui kebijakan politik.

Gubernur Jawa Timur menanggapi dengan menerbitkan surat tertanggal 16 Agustus 1984 yang ditujukan kepada 9 pimpinan kabupaten dan kota di kawasan yang dilintasi Sungai Brantas. Dalam suratnya gubernur menginstruksikan penghentian dan larangan pengambilan pasir di sejumlah lokasi. Pada tanggal 24 Januari 1985 Sekretaris Wilayah Daerah Jawa Timur, Trimarjono, mengirim surat kepada 9 pimpinan wilayah, yang memintakan kembali perhatian mereka pada penghentian dan pelarangan secepatnya semua pengerukan pasir di tempat-tempat yang disebutkan rawan merusak kelestarian dan pemeliharaan proyek-proyek pengembangan dan pengamanan Sungai Brantas yang banjirnya sering mengancam (Arsip Bakesbangpol No.3080).

Seruan penertiban kepada pimpinan daerah rupanya tidak banyak mendatangkan hasil. Pembantu Gubernur bersama Wakil Dinas Pekerjaan Umum dan pimpinan Proyek Brantas Hilir dan Brantas Tengah yang melakukan tinjauan lapangan pada bulan Desember 1985 mengirim surat kepada gubernur Jawa Timur. Dalam laporan disebutkan sulitnya melarang pengerukan pasir dan kondisi sebagian tanggul yang rawan jebol saat musim penghujan tiba. Pada tanggal 5 November 1986 Gubernur Jawa Timur Wahono mengeluarkan surat kepada 9 pimpinan wilayah di sepanjang Sungai Brantas agar lebih tegas dan tidak ragu-ragu menertibkan pengerukan pasir Sungai Brantas, serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan pemeriksaan ijin penambangan (Arsip Bakesbangpol No.3080). Bahkan Pangdam V/Brawijaya ikut mengirim surat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berisi permintaan informasi terkait masalah penertiban pengambilan pasir Sungai Brantas. Dalam jawaban suratnya, Sekretaris Wilayah/Daerah Provinsi Jawa Timur, Drs. Soemarjono menyampaikan bukti-bukti korespondensi antar pimpinan daerah dan penegasan kebijakan gubernur dalam menertibkan pengambilan pasir Sungai Brantas dan implementasinya di daerah (Arsip Bakesbangpol No.3080).

Problem penambangan bertambah pelik pada masa reformasi dengan merosotnya kepatuhan terhadap hukum. Praktek penambangan mekanis meluas dan sulit dikendalikan. Pemerintah merespons problem tersebut dengan beragam cara. Dari sisi regulasi, Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 29 Tahun 2003 tentang pengelolaan usaha pertambangan pasir di sepanjang sungai Kali Brantas, Kali Surabaya, Kali Porong dan Kali Marmoyo. Dua tahun kemudian terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai. Perangkat regulasi ini dimaksudkan untuk menyediakan payung hukum yang lebih dalam melakukan penertiban kegiatan penambangan pasir. Komitmen untuk menuntaskan problem penambangan pasir yang merusak diwujudkan seluruh pemda yang wilayahnya dilintasi Sungai Brantas dengan pencanangan “perang” terhadap penambangan pasir Sungai Brantas (Surya, 14 Oktober 2010).

Di lapangan, penegakan peraturan dilakukan baik secara persuasif maupun melalui kegiatan razia. Kegiatan razia penambangan pasir mekanis, misalnya, dilakukan di Kelurahan Semampir Kota Kediri bulan April 2010. Dalam operasinya ini aparat gabungan merobohkan bangunan-bangunan konveyor (Radar Kediri, 5 Mei 2010). Aparat gabungan

Satpol PP Kediri dan TNI melakukan razia di Kecamatan Ngadiluwih dan Mojo. Operasi penertiban berhasil menyita perlengkapan penambangan dan mengamankannya ke Kantor Satpol PP Kabupaten Kediri (Radar Kediri, 5 Mei 2010). Kegiatan penambangan pasir mekanik dideadline hingga tanggal 14 Juli 2010 dan setelahny kegiatan ini dianggap tindak pidana melanggar undang-undang yang diancam sanksi hukum (Radar Kediri, 15 Juli 2010). Hal ini ternyata tidak membuat para penambang pasir mekanik takut. Mereka kembali beroperasi sehingga mengundang operasi penertiban. Dalam razia pada 12 Agustus 2010, aparat menyita dan menenggelamkan dua unit diesel penyedot pasir ke dasar sungai (Surya, 13 Agustus 2010).

Tidak semua operasi penertiban berhasil dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagian rupanya bocor sehingga penambang sempat melarikan diri dan menyembunyikan perlengkapan penambangan sebelum aparat tiba di lokasi (Surya, 10 April 2010). Untuk melepaskan diri dari sergapan aparat penertiban, penambang mekanis di Bendungan Waruturi Gempengrejo Kediri dilaporkan menggunakan cara berpindah-pindah dengan perahu (Memorandum, 26 April 2017). Kegagalan operasi penertiban mendorong pemerintah mencari jalan lain. Pemerintah Kota Kediri, misalnya, mendekati komunitas penambang pasir mekanis dan mengajak mereka berunding mencari penyelesaian. Kesepakatan berhasil dicapai dan ditandatangani kedua belah pihak pada 20 Oktober 2010. Dalam kesepakatan tersebut pihak penambang menyatakan bersedia melakukan alih profesi dari penambang ke pedagang pasir. Mereka akan kulakan pasir langsung dari kantong-kantong pasir di wilayah Udanawu Blitar atau aliran lahar Gunung Kelud. Sementara itu, pihak pemerintah kota menjanjikan fasilitas berupa lokasi untuk memasarkan pasir dan bantuan modal. Dalam praktek kesepakatan sulit terlaksana. Sehari setelah kesepakatan ditandatangani, sejumlah penambang sudah beroperasi kembali seperti dilaporkan berlangsung di belakang DPRD Kota Kediri (Radar Jember, 22 Oktober 2010).

Sebagian masyarakat yang merasakan dampak buruk penambangan menyuarakan penolakan terhadap kegiatan penambangan mekanis dalam bentuk unjuk aspirasi maupun aksi yang lebih keras. Warga Desa Jongbiru di Kecamatan Gempengrejo dan warga Desa Jabon Kecamatan Banyakan Kediri diberitakan mengusir para penambang dan bahkan lebih ekstrem lagi terpaksa membakar perahu para penambang mekanis yang tidak menggubris penolakan mereka. Akan tetapi, upaya ini tidak berhasil menghentikan kegiatan penambang liar yang mendapat suntikan modal dari para bandar yang menjadi penopang mereka. Dukungan modal terhadap penambangan mengambil beragam bentuk seperti kredit mesin diesel penyedot pasir, konveyor, perahu dan kelengkapannya (Surya, 10 April 2010; 12 April 2010).

Penolakan masyarakat, regulasi, operasi penertiban, dan meja perundingan ternyata tidak berhasil menghentikan penambangan pasir di Sungai Brantas. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan adalah kelemahan dalam penegakan hukum akibat keterlibatan sejumlah oknum di kalangan pemerintah dan tokoh politik dalam bisnis pasir Sungai Brantas (Radar Kediri, 29 April 2012). Oknum-oknum tersebut sering disebut “promotor”

yang keberadaan mereka dibenarkan sejumlah orang baik dari kalangan pemerintah maupun pelaku penambangan. Bambang Sumarjono, mantan kepala dinas di Kediri mengatakan bahwa oknum aparat pemerintah yang mendekati penambang pasir mekanis sebagian adalah teman-temannya sendiri. Eko Budi Santoso, mantan anggota satpol PP dan staf dinas perhubungan Kediri menyatakan bukan hanya oknum aparat saja, sebagian promotor berasal dari pelaku politik (Radar Jember, 22 Oktober 2010). Seorang responden yang juga pelaku penambangan pasir di Ngadiluwih menyatakan bahwa ia pernah mengoperasikan dua mesin penyedot pasir milik oknum aparat keamanan setempat (Wawancara Supriono, 28 Juni 2019).

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Krisis lingkungan Sungai Brantas lahir sebagai konsekuensi perubahan dalam cara ekstraksi sedimen pasir dari penambangan tradisional ke penambangan secara mekanis. Penambangan pasir yang semula memberi manfaat ekonomi dan mitigasi bencana banjir Sungai Brantas dalam waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun berubah menjadi bencana dengan berkembangnya penambangan mekanis. Permintaan pasir yang meningkat secara drastis seiring dengan pembangunan infrastruktur khususnya di metropolitan Surabaya dan sekitarnya menjadikan pasir Brantas sebagai produk yang menjanjikan keuntungan besar dan banyak diburu para pengusaha tambang pasir. Dari Mojokerto dan Jombang, penambangan pasir mekanis meluas ke wilayah Kediri dan wilayah Sungai Brantas yang lebih hulu yang kandungan pasirnya belum banyak dieksploitasi secara masif. Dampak negatif yang ditimbulkan penambangan pasir mekanis segera bermunculan karena kecepatan pembentukan sedimen pasir oleh aliran sungai yang mengangkutnya dari sumbernya di Gunung Kelud jauh terlampaui oleh besarnya volume pasir dan kecepatan ekstraksi mesin penyedot pasir. Bangunan yang berlokasi di atas dan di sepanjang bantaran sungai kehilangan sedimen tanah dan pasir yang menopang dan terancam tidak berfungsi lagi. Sebagian bangunan dan pekarangan bahkan hilang karena longsor akibat kemiringan dan kedalaman Sungai Brantas yang terus bertambah karena disedot pasirnya. Selain berdampak merugikan secara ekonomi, penambangan pasir mekanis menghadirkan tanda-tanda bencana lingkungan yang tidak terpuhkan.

Kerusakan Sungai Brantas karena faktor antropogenis yang bersumber dari penambangan mekanis memang mendorong munculnya kesadaran bahwa terjadi krisis lingkungan Sungai. Kesadaran tersebut tumbuh tidak hanya di kalangan pemerintah, melainkan juga di kalangan lembaga swadaya masyarakat, dan terlebih warga masyarakat yang merasakan dampak merugikan penambangan pasir dalam bentuk rusaknya infrastruktur transportasi. Berbagai langkah untuk mengatasi problem penambangan pasir mekanis telah dilakukan mulai dari payung regulasi, negosiasi, operasi penertiban, hingga penuntutan secara hukum terhadap para pelanggar. Namun demikian, semua upaya yang telah dilakukan rupanya belum

efektif menghentikan operasi penambangan pasir. Krisis lingkungan Sungai Brantas akibat penambangan pasir belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir hingga saat ini, bahkan tampaknya malah semakin parah karena sebab-sebab lain yang mempengaruhi nyawa sungai ini khususnya pencemaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat disarankan bahwa penindakan hukum secara tegas terhadap pelaku tambang dan para promotornya merupakan keharusan bila tidak ingin melihat Sungai Brantas kehilangan fungsinya sebagai nadi kehidupan bagi semua. Di samping itu, perlu komitmen lebih kuat dari para penambang untuk meninggalkan kegiatan penambangan dan komitmen pemerintah dalam penyediaan fasilitas yang diperlukan secara memadai untuk mendukung proses alih profesi ke pekerjaan lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Arsip dan Koran**

- Arsip Bakesbangpol Jatim, No.3080. "Penanganan Penambangan Pasir Sungai Brantas". Surabaya: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Timur.
- Arsip Jasa Tirta. No. 32/WB/PPB."Flood Report in the Widang River Basin". Kediri: Perum Jasa.
- Kompas, 2008. "Penambangan Pasir Liar di Kali Brantas, Kediri". 30 April.
- Memorandum. 2017. "Penambang Pasir Waraturi Siasati Razia Petugas", 26 April, hlm. 20.
- Radar Kediri, 2010. "Ancam Tenggelamkan Mesin Penyedot Pasir", 16 Juli, hlm. 29.
- Radar Kediri, 2010. "Bermain, Aparat Harus Dibersihkan", 20 Oktober, hlm. 29, 39.
- Radar Kediri, 2010. "Ditabrak Perahu Penambang, Jembatan Mrican Tutup Total", 29 April, hlm. 29.
- Radar Kediri, 2010. "Lima Jenis Ikan Sungai Brantas Punah", 16 Juli, hlm. 33,43.
- Radar Kediri, 2010. "Nyatakan Perang Lawan Cukong Pasir", 2 Desember, hlm. 29.
- Radar Kediri, 2010. "Penambang Pasir kembali, Jembatan Mrican Retak", 5 Mei, hlm. 29, 39.
- Radar Kediri, 2010. "Sehari Diteken Sudah Dilanggar". 22 Oktober, hlm. 33.
- Radar Kediri, 2010. "Ungkap Kerusakan Lingkungan", 22 Juli, hlm. 29,39.
- Radar Kediri, 2012. "Razia Penambangan Pasir Liar DAS Brantas Kediri,29 April.
- Radar Kediri. 2012."Razia Penambangan Pasir Liar Das Brantas Kediri", 29 April.
- Radar Kediri. 2013."Penambangan Pasir Liar dan Bencana Longsor", 15 April.

- Surya, 2010. “Benang Kusut Penambang Pasir Sungai Brantas (1): Ada Pemodal Besar yang Menjadi Bandar”, 10 April, hlm. 8.
- Surya, 2010. “Benang Kusut Penambang Pasir Sungai Brantas: Sedimen Pasir Tersedot, Pondasi Ambles”, 12 April, hlm. 8.
- Surya, 2010. “Jembatan Baru Kediri Tunggu Tahun Depan”, 12 Mei, hlm. 8.
- Surya, 2010. “Jembatan Mrican Ditutup Sengsarakan Warga”. 7 Mei, hlm. 8.
- Surya, 2010. “Razia Brantas Tebang Pilih”, 13 Agustus, hlm. 8.

### **Artikel, Buku, dan Laporan**

- Asnan, Gusti. (2016). *Sungai dan Sejarah Sumatra*. Yogyakarta: Ombak.
- Basundoro, Purnawan. 2013. *Merebut Ruang Kota: Aksi Rakyat Miskin Kota Surabaya 1900-1960-an*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri
- Diamond, Jared. (2014). *Collapse: Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dick, Howard W. (2002). *Surabaya, City of Work: A Socioeconomic History, 1900-2000*. Singapore: National University of Singapore.
- Fathurrohman, M. (2012). *Memahami Dampak Penambangan Pasir*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Gunawan, R. (2008). *Sungai sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah.
- \_\_\_\_\_. (2010). *Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Hannigan, J. 2006. *Environmental Sociology*. London: Routledge.
- Husain, S. (2016). “Mengubah dan Merusak Lingkungan, Mengundang Air Bah: Banjir di Kota Surabaya pada Paruh Kedua Abad ke-20”. *Disertasi*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Jasa Tirta. 2012. “DAS Brantas Kabupaten Kediri”. *Laporan Tahunan*. Kediri: Perum Jasa Tirta
- Keraf, S. (2010). *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kumalasari, I. (2018). “Gerakan Kali Bersih di Kali Surabaya Tahun 1987-1997”, *Skripsi*. Jember: Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya.
- Lapian, Adrian B. 2008. “Sungai sebagai Pusat Peradaban”, dalam Restu Gunawan (ed). *Sungai sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, hlm.1-13.
- Lucas, A., Djati, A. W. (2000). *The Dog is Dead so Throw it in the River: Environmental Politics and Water Pollution in Indonesia: an East Java Case Study*. Clayton: Monash Asia Institute.

- Mahmudi, I. (2012). *Kerusakan Ekosistem Sungai Brantas Akibat Ulah penambangan Pasir Liar di Kabupaten Blitar*. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Fathurohman, M. (2012). "Memahami Dampak Penambangan Pasir". Laporan Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian, Universitas Brawijaya.
- Nawiyanto. (2018). "Historiografi Lingkungan: Konteks, Praktek dan Prospeknya di Indonesia". Jember: Fakultas Ilmu Budaya.
- Parwanto, W. (2008). "Kali Brantas dan Bencana Alam", dalam Restu Gunawan (ed). *Sungai sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, hlm. 173-190.
- Poesponegoro, M. D., Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purnama, H. D. (2013). *Dampak Penambangan Pasir Mekanik Sungai Brantas di Kediri*. Universitas Negeri Malang.
- Ridho'i, R. "Doom to Disaster ? Industrial Pollution in Sidoarjo 1975-2006", *Lembaran Sejarah*, Vol. 13. No. 2, pp. 204-220.
- Sarkawi. 2016. "Mengubah dan Merusak Lingkungan Mengundang Air Bah: Banjir di Kota Surabaya pada Paruh Kedua Abad ke-20". *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Siregar, G. V. (2012). *Sengketa Penambangan Pasir Mekanik Sungai Brantas: Studi Kasus Sengketa Aktivitas Penambangan Pasir Mekanik di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampingrejo, Kabupaten Kediri*. Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.
- Soekistijono. (2008). "Konservasi Sumberdaya Air di DAS Kali Brantas", dalam Restu Gunawan (ed). *Sungai sebagai Pusat Peradaban: Prosiding Seminar Perubahan DAS Brantas dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Direktorat Geografi Sejarah, hlm. 191-215.
- Storey, W. K. (2011). *Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### Daftar Informan

No	Nama	Alamat (Desa)	Pekerjaan	Tanggal Wawancara
1.	Supriono (57 th)	Tampibendo	Pengusaha Tambang Pasir Mekanik)	27, 28 Juni 2019
2.	Mondir (54 th)	Mlati	Supleyor Pasir	28, 29 Juni 2019
3.	Hari Setiono (64 th)	Tampibendo	Pensiunan	28, 29 Juni 2019
4.	Ervan Sodiq (54 th)	Jongbiru	Kuli Pasir	27 Juni 2019

